

Survei:
Pilkada
DKI Jakarta 2017

Prisma

Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Mengelola Cagar Budaya, Merawat Peradaban



LP3ES



Volume 36, 2017

2



*Mengelola Cagar Budaya,
Merawat Peradaban*

Vol. 36, No. 2, 2017

Prisma diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan ekonomi, perkembangan sosial dan perubahan kultural di Indonesia dan sekitarnya. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, sarjana, praktisi dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Prisma tidak selalu segar atau mencerminkan pendapat LP3ES. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Dilarang mengutip, menerjemahkan, dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi. © Hak cipta dilindungi Undang-undang.

ISSN 0301-6269

TOPIK KITA

- Daniel Dhakidae* 2 Arkeologi, Daya Ingat, dan Para Arkeolog
- Daud Aris Tanudirjo* 3 Peran Arkeologi dalam Kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia
- Sugih Biantoro & Endang Turmudi* 18 Di Bawah Bayang-bayang Kebesaran Majapahit: Kontestasi Pengelolaan Situs Bersejarah di Trowulan
- Dedi Supriadi Adhuri & Gutomo Bayu Aji* 30 Resistansi Spasial-Ekonomi-Kultural: Dinamika Perlawanan Masyarakat dalam Pengelolaan Candi Borobudur
- Tine Suartina & Herry Yogaswara* 46 Pengelolaan Banten Lama: Politik Ekonomi dan Kontestasi Lokal
- Idham Bachtiar Setiadi* 64 Warisan Budaya, Sikap Ilmiah, dan Kritik Kebudayaan
- Natsuko Akagawa* 71 Warisan Budaya, Identitas, dan Kepentingan Nasional di Jepang dan Korea
-

ESAI

- Fachru Nofrian Bakarudin* 60 Ekonomi-Politik Situs Bersejarah
-

SURVEI

- Leo Agustino* 85 Pilkada DKI Jakarta 2017: Analisis Singkat
-

BUKU

- Novi Anoegrajekti* 98 Kebijakan Kebudayaan: dari Kolonial ke Reformasi
-

106 PARA PENULIS

Vol. 36, No. 3, 2017: *Populisme*

Vol. 36, No. 4, 2017: *Budaya Humor*

Pendiri: Ismid Hadad, Nono Anwar Makarim • **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Daniel Dhakidae • **Redaktur Senior:** Ismid Hadad • **Dewan Redaksi:** A Tony Prasetyantono, Azyumardi Azra, Jaleswari Pramodhawardani, Kamala Chandrakirana, Sumit Mandal (Malaysia), Taufik Abdullah, Vedi R Hadiz (Australia) • **Redaktur Pelaksana Jurnal & Portal:** Harry Wibowo • **Redaktur Ekonomi:** Fachru Nofrian Bakarudin • **Redaksi:** E Dwi Arya Wisesa, Nezar Patria, Rahadi T Wiratama • **Direktur Bisnis & Pengembangan:** Elya G Muskitta • **Produksi:** Awan Dewangga

Alamat: LP3ES, Jalan Pangkalan Jati No. 71, Pondok Labu-Cinere, Depok 16513, Indonesia. Telp/Faks: (6221) 27654031
Email: prisma@prismajurnal.com; prisma.redaksi@gmail.com; Website: www.prismajurnal.com; www.prismaresource.com
Bank: MANDIRI, KCP RSKD, Jakarta. Nomor Rekening: 117-000-800-046-5 a/n Prisma

Pilkada DKI Jakarta 2017: Analisis Singkat

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung DKI Jakarta tahun 2017 sangat menarik dan penting untuk dianalisis karena memberi warna tersendiri bagi perpolitikan nasional. Pilkada tersebut bukan hanya menjadi medan pertempuran bagi para kandidat yang bersaing, namun juga sebagai arena persaingan partai-partai politik yang mendukung kandidat masing-masing. Bahkan, Pilkada DKI Jakarta 2017 sering diberi makna sebagai representasi pemilihan umum (pemilu) Indonesia. Karena itu, jika kandidat yang didukung partai politik tertentu memenangi pilkada Jakarta, maka dapat diasumsikan partai pendukungnya pun akan memenangi pemilu yang akan diselenggarakan pada 2019. Namun demikian, tulisan ini tidak membicarakan upaya kemenangan pada Pemilu 2019, tetapi lebih pada analisis pilkada DKI Jakarta dengan pelbagai dinamikanya.

Artikel ini dibagi menjadi empat bagian. Pertama, membahas kerangka teori secara ringkas untuk menjelaskan sekaligus memahami perilaku pemilih dalam pilkada Jakarta. Tiga teori dibicarakan dalam bagian ini, yaitu pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Kedua, mendeskripsikan pilkada Jakarta putaran pertama, termasuk dinamika yang muncul di dalamnya, serta membahas profil dan partai pendukung masing-masing kandidat. Ketiga, menilai faktor kemenangan pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) serta kekalahan pasangan Basuki Tjahaya Purnama (akrab disapa Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam pilkada Jakarta putaran kedua. Kemenangan Anies-Sandi disebabkan oleh kentalnya isu agama dan karakter kandidat bersangkutan. Bagian terakhir, keempat, merupakan simpulan yang merangkum seluruh pembahasan.

Perilaku Pemilih: Sebuah Diskusi Teoretis

Kemenangan pasangan kandidat secara teoretis sangat bergantung pada dukungan pemilih. Dengan kata lain, perilaku pemilih dalam memilih turut memengaruhi perolehan suara pasangan kandidat tertentu. Setidaknya, dalam konteks ilmu politik, ada tiga pendekatan (teori) untuk memahami perilaku pemilih: pendekatan sosiologi, identifikasi partai (pendekatan psikologi), dan pilihan rasional.

Pendekatan sosiologi atau lebih dikenal sebagai "Pendekatan Columbia" diperkenalkan kali pertama oleh Lazarsfeld dan kawan-kawan pada 1944.¹ Menurut pendekatan itu, perilaku

¹ Pendekatan Columbia adalah kajian lapangan yang meneliti corak perilaku pemilih dalam pemilihan umum di Amerika Serikat pada 1940. Pendekatan itu merupakan hasil karya akademik sekelompok peneliti dari Universitas Columbia, seperti Bernard Berelson, Paul Felix Lazarsfeld, dan lain-lain. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa faktor sosiologi berperan penting dalam memengaruhi perilaku pemilih. Lebih lanjut mengenai hal itu; lihat, Paul Felix Lazarsfeld,

sebagian besar pemilih dipengaruhi oleh ikatan serta status sosio-ekonomi, agama, dan lingkungan tempat tinggal mereka.² Ringkasnya, pemilih akan memilih partai atau kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum bukan berdasarkan isu yang diangkat dalam kampanye pemilihan, tetapi lebih disebabkan oleh pengaruh sosial dan kedekatannya dengan lingkungan ataupun komunitas mereka. Menurut Lazarsfeld dan kawan-kawan, "*People vote not only with their social group, but also for it*".³

Pendekatan tersebut kemudian dikembangkan Berelson, Lazarsfeld, dan McPhee pada 1954 dalam kajian mereka berjudul *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign*.⁴ Mereka menemukan bahwa faktor-faktor sosial, seperti agama, etnik, dan status sosial-ekonomi, sangat menentukan perilaku pemilih. Pendekatan tersebut lantas dielaborasi lebih mendalam oleh Seymour Martin Lipset serta Stein Rokkan dan Seymour Martin Lipset.⁵ Kajian mereka menumpukan perhatian pada perilaku pemilih di Eropa dan menemukan beberapa hal yang kurang lebih sama dengan temuan para ilmuwan sebelumnya bahwa pemilih (di Eropa) telah terpolarisasi menjadi pemilih kota dan desa, buruh dan majikan, serta aktivis gereja dan bukan—polarisasi yang amat sangat menentukan perilaku pemilih.

Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* (New York: Columbia University Press, 1968); Ian Budge dan Dennis J Farlie, *Voting and Party Competition: A Theoretical Critique and Synthesis Applied to Survey from ten Democracies* (New York: Wiley, 1977).

² Lazarsfeld, et al., *The People's Choice...*, hal. 69.

³ Lazarsfeld, et al., *The People's Choice...*, hal. 148.

⁴ Lihat, Bernard R Berelson, Paul Felix Lazarsfeld, dan William N McPhee, *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign* (Chicago: Chicago University Press, 1954).

⁵ Lihat, Seymour Martin Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics* (New York: Doubleday & Co., 1960); Stein Rokkan dan Seymour Martin Lipset, *Party Systems and Voter Alignment: Cross National Perspectives* (New York: Free Press, 1967).

Pendekatan Columbia berhasil menemukan jawaban mengenai perilaku pemilih di Amerika Serikat dan Eropa, namun beberapa sarjana seperti Wright serta Glasgow dan Alvarez menjumpai adanya kelemahan di dalam pendekatan itu.⁶ Mereka menyatakan bahwa kajian mengenai perilaku pemilih tidak dapat dipahami melalui perspektif sosiologis semata. Sebaliknya, perilaku pemilih juga dapat dimengerti melalui peran media, manifesto partai politik, struktur ekonomi negara, serta hubungan erat antara pemilih dengan partai politik. Sebab itulah muncul pemikiran atau pendekatan Michigan yang mengisi kekurangan pendekatan Columbia dengan mengintroduksi model psikologis atau pendekatan identifikasi (ke)partai(an).⁷

Gagasan pokok yang dikemukakan pendekatan identifikasi partai (Pendekatan Michigan) adalah *partisanship*—merujuk pada kesetiaan anggota terhadap partai politik yang dia dukung. Campbell dan kawan-kawan menggambarkan *partisanship* sebagai, "*A perceptual filter through which the voters appreciate that which is unfavorable to the orientation of his party and ignore or devalue that which is unfavorable*".⁸

⁶ Lihat, Gerald C Wright Jr, "Contextual Models of Electoral Behavior: The Southern Wallace Vote", dalam *American Political Science Review*, 71, 1977, hal. 497-508; Garrett Glasgow dan R Michael Alvarez, "Voting Behavior and Electoral Context of Government Formation", dalam *Electoral Studies*, 24, 2005, hal. 245-264.

⁷ Pendekatan Michigan adalah kajian yang dihasilkan oleh gabungan peneliti dari Universitas Michigan. Hasil kajian sarjana-sarjana Michigan bertolak belakang dengan Pendekatan Columbia. Kajian mereka menunjukkan bahwa faktor utama yang menggerakkan pemilih untuk memilih partai atau kandidat yang bersaing dalam pemilu adalah faktor psikologi individu bersangkutan. Temuan itu didasarkan pada jawaban kuesioner saat pemilu presiden AS tahun 1948; lihat, Angus Campbell dan Robert L Kahn, *The People Elect a President* (Michigan: Institute for Social Research, University of Michigan, 1952) serta Budge dan Farlie, *Voting and Party Competition...*

⁸ Angus Campbell, Warren E Miller, Phillip E Converse, dan Donald E Stokes, *The American*

Itu berarti pemilih mengidentifikasi diri pada sebuah partai politik dan ini yang memengaruhi sikap dan perilakunya dalam memilih. Perubahan dalam tubuh partai yang disebabkan oleh manifesto partai, gaya kampanye yang berbeda, atau calon yang bertanding dalam setiap pemilihan, tidak akan memberi kesan apa pun kepada setiap anggota partai, "... *once established is an attachment which is not easily changed.*"⁹

Namun demikian, pendekatan identifikasi partai dikritik oleh Goldberg, Butler, Strokes, Dalton, Flanagan, dan Beck.¹⁰ Mereka berargumentasi bahwa ikatan kesetiaan terhadap partai politik adalah sesuatu yang rumit karena melibatkan "emosi" yang juga bisa menyebabkan seorang pemilih justru memilih partai politik lain. Bagi Goldberg, Butler, dan Strokes, ikatan kesetiaan individu pada partai didorong oleh aspek kepentingan pemilih; partai yang bisa memenuhi keperluan dan kepentingan anggota, baik dalam jangka pendek maupun panjang, akan menjadi dasar pemilih dalam mendukung partai politik atau kandidat tertentu. Jadi, perilaku pemilih tidak bisa dipahami melalui pendekatan sosiologi atau psikologi semata, tetapi juga mesti dimengerti melalui faktor lain yang disebut Goldberg, Butler, Strokes, Dalton, Flanagan, dan Beck, sebagai "rasionalitas pemilih"—lebih dikenal dengan istilah pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*). Sebagaimana dipaparkan Anthony Downs.¹¹

Our main thesis is that parties in democratic politics are analogous to entrepreneurs in a profit-seeking economy. So as, to attain their private ends, they formulate whatever policies they believe will gain the most votes, just as entrepreneurs produce whatever products they believe will gain the most profits for the same reason. In order to examine the implications of this thesis, we have to assume that citizens behave rationally in politics. This premise is itself a second major hypothesis.

Logika utama yang melandasi teori pilihan rasional adalah konsep rasionalitas. Rasionalitas dimaksud adalah interaksi pemilih dan partai/kandidat yang bertindak berdasar kepentingan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing—"nilai" objektif tersebut dapat direalisasi melalui pemilihan umum.¹² Mekanisme interaksi dirasionalisasi melalui timbal-balik antara tujuan partai/kandidat untuk mendapatkan suara yang besar dalam pemilu agar memperoleh kekuasaan dan tujuan pemilih dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, pemilih akan menggunakan suara untuk memaksimalkan manfaat yang ingin diperoleh dari partai/kandidat yang mereka pilih. Sebaliknya, partai politik atau kandidat berupaya memaksimalkan perolehan suara dalam pemilu dengan menawarkan sejumlah program kerja kepada para pemilih. Karena itu, interaksi pemilih dan partai politik dapat dikatakan merupakan sebuah arena pertukaran antara suara pemilih dengan program kerja yang ditawarkan oleh partai atau kandidat.

Voter (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hal. 122.

⁹ Campbell *et al.*, *The American Voter*, hal. 149.

¹⁰ Arthur S Goldberg, "Social Determinism and Rationality as Bases of Party Identification", dalam *American Political Science Review*, 63 (1), 1969, hal. 5-25; David Butler dan Donald Stokes, *Political Change in Great Britain* (New York: St. Martin's, 1969); Russel J Dalton, Scott C Flanagan, dan Paul Allen Beck, *Electoral Change in Advanced Industrial Democracies: Realignment or Dealignment?* (New Jersey: Princeton University Press, 1984).

¹¹ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper & Row, 1957), hal. 295.

Pilkada DKI Jakarta Putaran Pertama

Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia berpenduduk 12 juta orang di siang hari dan 8 juta di saat malam. Setidaknya 7,2 juta pemilih tercatat dalam Pilkada 2017. Jakarta juga merupakan miniatur Indonesia karena hampir setiap etnis di negeri ini menetap di kota itu.

¹² Budge dan Farlie, *Voting and Party Competition...*, hal. 103.

Bahkan, beberapa analis mengandaikan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diadakan pada Februari 2017 (putaran pertama) dan April 2017 (putaran kedua) adalah “pemilu kecil” Indonesia. Artinya, hasil pilkada di Jakarta bisa menunjukkan kemungkinan konfigurasi perpolitikan pada Pemilu 2019. Karena itulah pilkada Jakarta menjadi ajang “peperangan” amat strategis bagi partai politik yang tengah bersaing. Selain itu, bagi elite partai, pilkada Jakarta dijadikan bahan evaluasi atas perilaku pemilih di Jakarta—yang juga menunjukkan miniatur Indonesia—mengenai seberapa kuat pengaruh dan karisma kandidat, strategi kampanye yang dijalankan, koalisi yang dibentuk, dan sebagainya.

Sebelum Pilkada 2017, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (akrab disapa Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Pasangan petahana ini siap mempertahankan kursi sebagai gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta periode 2017-2022. Pada periode 2012-2017, sebelum diangkat menjadi gubernur, Ahok adalah wakil gubernur berpasangan dengan Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Ketika itu, mereka berhasil mengalahkan Fauzi Wibowo (Foke), gubernur petahana. Ahok kemudian diangkat menjadi gubernur tidak lama setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014.¹³ Kursi wakil gubernur yang ditinggal-

kannya kemudian diisi Djarot Saiful Hidayat, mantan Wali Kota Blitar dan anggota DPR-RI dari PDI-P periode 2014-2019.

Sebagian besar masalah yang dihadapi Jakarta tidak banyak berubah menjelang Pilkada 2017. Kemacetan lalu lintas, banjir, permukiman kumuh, dan inefisiensi birokrasi adalah sedikit dari banyak masalah yang harus diselesaikan oleh calon kepala daerah yang hendak “bertarung” dalam pilkada. Tiga masalah pertama itu menjadi program prioritas Jokowi-Ahok saat dicalonkan sebagai gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2012. Namun demikian, ketiga masalah tersebut tetap menjadi masalah krusial yang dihadapi Jakarta menjelang Pilkada 2017. Tidak mengherankan bila kandidat yang maju dan bersaing dalam Pilkada 2017 di DKI Jakarta mengangkat ketiga masalah tersebut sebagai bagian dari program kerja mereka.

Ada tiga pasang calon yang berkontestasi memperebutkan kursi gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi). Dalam Pilkada 2017, tidak ada pasangan calon yang maju dari jalur independen. Dibanding pilkada lima tahun sebelumnya dengan dua calon independen, yakni pasangan Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patri dan pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin. Sementara itu, semua pasangan calon yang maju dalam Pilkada 2017 didukung oleh koalisi atau gabungan partai politik. Agus-Sylvi didukung koalisi empat partai, yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Begitu pula

¹³ Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi berhasil memenangi kontestasi “Jakarta 1” menyisihkan lima pasangan calon lainnya, termasuk petahana. Kemenangannya bersama Ahok dianggap mencerminkan dukungan bagi pemimpin yang bersih, kapabel, inovatif, dan muda (meski usianya waktu itu sudah 50 tahun lebih). Sejak terpilih sebagai gubernur, popularitas Jokowi terus menanjak dan muncul wacana untuk mendorongnya menjadi calon presiden periode 2014-2019. Hasil survei beberapa lembaga survei menunjukkan nama Jokowi mengungguli nama-nama besar seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Dalam pemilu presiden tahun 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla melawan pasangan Prabowo-Hatta

Radjasa. Jokowi akhirnya terpilih sebagai Presiden RI ke-7 dan posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta “diserahkan” kepada sang wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lebih lanjut tentang Pemilu 2014; lihat, Leo Agustino, “Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014”, dalam *Prisma* Vol. 33, No. 1, 2014, hal. 110-125.

Tabel 1. Perolehan Suara, Persentase, dan Kursi

Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase	Kursi
Nasdem	206.117	4,72%	5
PKB	260.159	5,66%	6
PKS	424.400	10,38%	11
PDI-P	1.231.843	26,24%	28
Golkar	376.221	8,49%	9
Gerindra	592.568	14,15%	15
Demokrat	360.929	9,43%	10
PAN	172.784	1,89%	2
PPP	452.224	9,43%	10
Hanura	357.006	9,43%	10

Sumber: Diolah dari pelbagai sumber.

Ahok-Djarot yang disokong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara itu, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pasangan Anies-Sandi.

Apa makna dukungan partai-partai politik tersebut? Sebelum menjawab hal itu, Tabel 1 menunjukkan perolehan suara, persentase, dan kursi sepuluh partai politik di DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Menyitir Campbell dan kawan-kawan, "... *once established is an attachment which is not easily changed*,"¹⁴ dan bercermin pada Tabel 1 di atas serta jumlah kursi sebagai bentuk dukungan pemilih pada kandidat, maka pasangan Ahok-Djarot dan Agus-Sylvi akan melanjutkan persaingan pada putaran kedua. Pasangan Ahok-Djarot diperkirakan akan memperoleh dukungan hingga 48 persen pemilih Jakarta atau setara dengan 2,1 juta orang pemilih, sementara pasangan Agus-Sylvi didukung oleh 27 persen pemilih atau setara dengan 1,2 juta pemilih, sedangkan pasangan Anies-Sandi didu-

kung oleh 25 persen atau setara dengan 1 juta lebih pemilih. Namun, sebagaimana disampaikan Campbell dan kawan-kawan, perilaku pemilih bukan hanya berdimensi psikologis atau hitung-hitungan matematika sederhana. Perilaku pemilih juga turut dipengaruhi faktor-faktor sosiologis dan pilihan rasional, seperti kampanye, manifesto kandidat, agama, dan lain-lain. Dari semua faktor yang perlu dipertimbangkan, isu agama, karakter kandidat, dan hasil debat, menjadi pemicu dinamika di antara pilihan para pemilih.

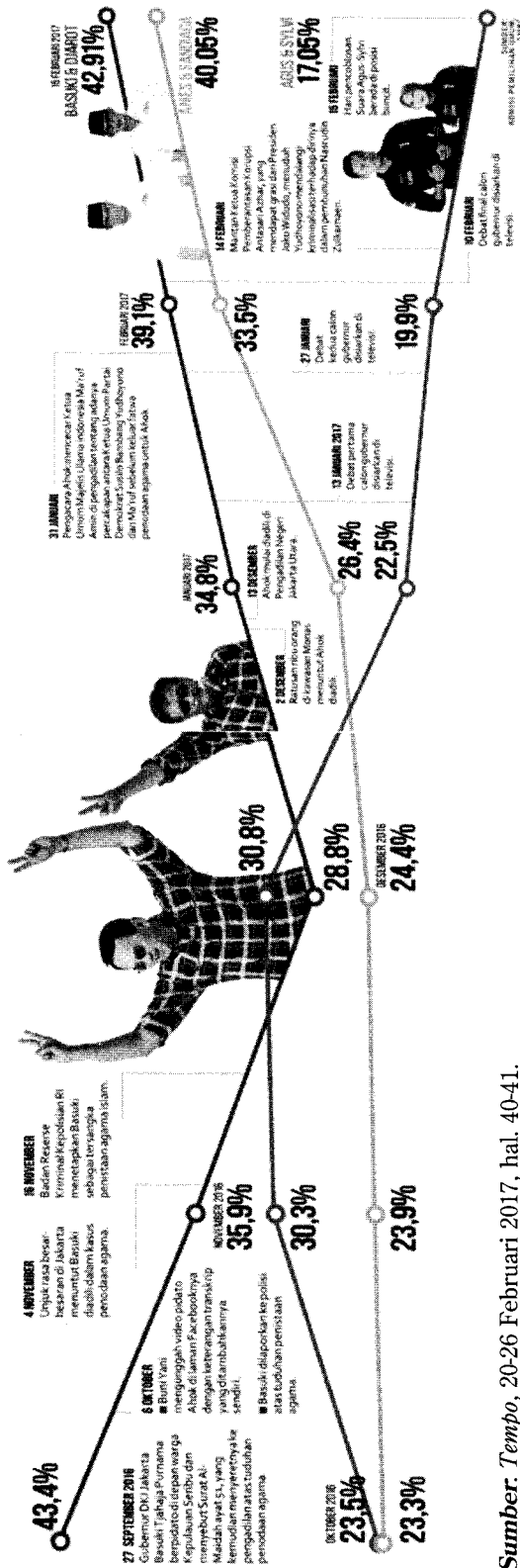
Merujuk pendekatan sosiologis, kesamaan agama antara pemilih dan kandidat turut berperan menjelaskan distribusi dukungan politik para pemilih. Dengan kata lain, kesamaan agama membentuk dan menjadi motif pemilih untuk menyalurkan suara. Namun demikian, bukan hanya kesamaan agama saja yang "menggelorakan" dinamika politik pilkada di Jakarta. Yang sesungguhnya terjadi adalah pembingkai peristiwa berkait isu agama. Pada akhir September 2016, Ahok mengutip Surat al-Maidah ayat ke-51 dalam acara temu-wicara dengan warga di Kepulauan Seribu. Acara tersebut masuk ke ruang publik lebih luas melalui penyebaran video di media sosial yang diunggah Buni Yani.¹⁵ Sebagian tokoh agama dan lawan politik gubernur petahana mbingkai ucapan Ahok di Kepulauan Seribu tersebut sebagai penistaan agama.

Hal tersebut makin "menggelembung" ketika perhatian warga Jakarta (dan Indonesia) terfokus pada isu penistaan agama melalui

¹⁵ Buni Yani mentranskripsi percakapan Basuki Tjahaja Purnama dengan warga di Kepulauan Seribu, yang sebelumnya direkam dan diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di situs YouTube. Dalam percakapan tersebut Ahok menyatakan bahwa "tidak masalah jika warga yang dibohongi pakai Surat al-Maidah 51 dan macam-macam," tidak memilihnya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ahok menyampaikan hal itu karena Surat Al-Maidah ayat 51 kerap ditafsirkan sebagai ayat yang melarang Muslim untuk menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin mereka, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta.

¹⁴ Campbell, *et al.*, *The American Voter*, hal. 149.

Gambar 1 Naik-Turun Dukungan Pemilih Pada Pasangan Kandidat



Sumber: Tempo, 20-26 Februari 2017, hal. 40-41.

serangkaian aksi demonstrasi yang digagas oleh beberapa tokoh agama, seperti Muhammad Rizieq Shihab (aka Habib Rizieq), Abdullah Gymnastiar (aka AA Gym), Bachtiar Nasir, dan lain-lain pada 4 November 2016 (“demo 411”), 12 Desember 2016 (“demo 212”), dan 11 Februari 2017 (“demo 112”). Faktor sosiologis itu tampak sangat kuat dengan bingkai isu “penistaan agama” sebagai pemersatu sekaligus pembelah kesamaan agama di antara calon pemilih yang Muslim dan non-Muslim. Rangkaian demo tersebut segera berdampak terhadap naik-turunnya dukungan pemilih terhadap ketiga pasangan kandidat.

Pada Oktober 2016, dukungan terhadap Ahok berada pada angka 43,4 persen. Namun, pada akhir November 2016, dukungan tersebut anjlok ke angka 28,8 persen.¹⁶ Data *Tempo* tersebut menjelaskan bahwa para pemilih yang menganggap ujaran Ahok sebagai sebuah penistaan agama cenderung menolak pasangan petahana dan sebaliknya memberikan dukungan pada dua pasangan kandidat lain. Jadi, bukan semata faktor sosiologis (kesamaan agama antara pemilih dan kandidat) yang memengaruhi dukungan suara para pemilih, melainkan juga adanya proses politis atas isu penistaan agama yang menentukan naik-turunnya suara (dukungan) kandidat tertentu, terutama penurunan dukungan calon pemilih terhadap pasangan Ahok-Djarot.

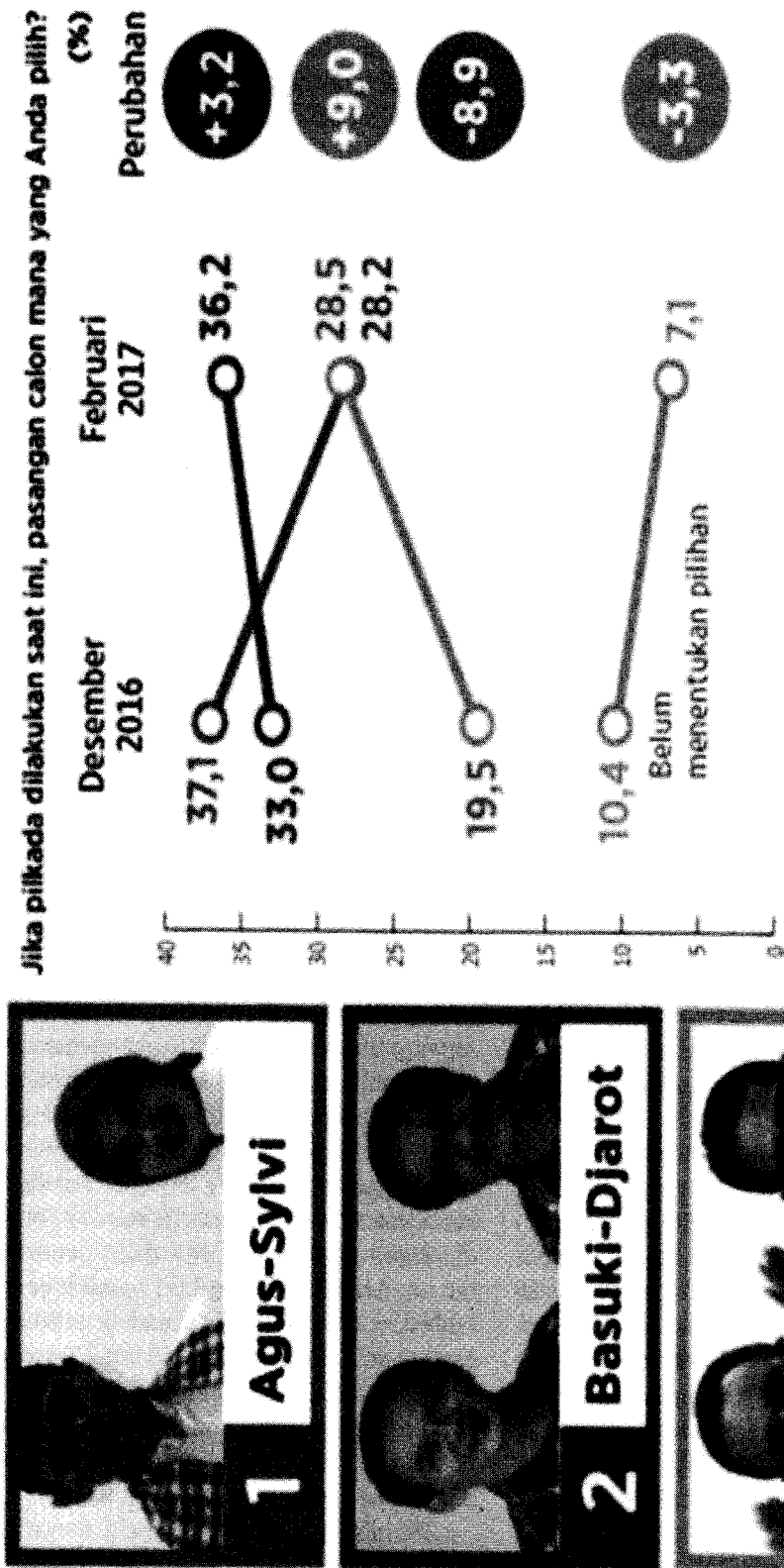
Akhir November 2016, suara calon pemilih yang mendukung gubernur petahana berada pada titik terendah, namun beranjak naik kembali pada awal Desember 2016. Pada Januari 2017, persentasenya sebesar 34,8 persen naik menjadi 39,1 persen pada bulan Februari 2017 dan saat pencoblosan angkanya telah menyentuh 42,91 persen (lihat, Gambar 1). Data *Tempo* tersebut juga terkonfirmasi dari hasil survei harian *Kompas* yang menunjukkan tren peningkatan pada pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Sebaliknya, perolehan suara

¹⁶ *Tempo*, 20-26 Februari 2017, hal. 40-41.

Gambar 2. ELEKTABILITAS PASANGAN CALON

Gambar 2.

ELEKTABILITAS PASANGAN CALON



Metode Survei

Penyempulan pendapat melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang "Kompas" tanggal 28 Januari-4 Februari 2017. Sebanyak 804 responden minimal berusia 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pengumpulan sistematis dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta. Responden berdomisili di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, representasikan penelitian ±3,46 persen. Merupakan demikian, kesalahan di luar pengumpulan ditunjukkan terjadi.

INFOGRAFIK: GENDHIAN

Sumber: Litbang "Kompas"

Sumber: e-paper harian Kompas (diunduh 2 Maret 2017).

pasangan Agus-Sylvi justru mengalami penurunan (lihat, Gambar 2). Padahal, pada Desember 2016, pasangan Agus-Sylvi mengungguli dua pesaing lainnya dengan dukungan 30,8 persen (Gambar 1) atau 37,1 persen (Gambar 2), disusul Ahok-Djarot dengan angka 28,8 persen (Gambar 1) dan Anies-Sandi 24,4 persen (Gambar 1) atau 19,5 persen (Gambar 2). Namun, pasangan Agus-Sylvi gagal mempertahankan suara pemilih yang terus-menerus merosot hingga hari pencoblosan pada 15 Februari 2017.

Mengapa suara yang diperoleh para kandidat bisa naik-turun? Boleh jadi hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni kemampuan berdebat para kandidat dalam acara debat terbuka serta persona diri yang berkorelasi dengan kinerja para kandidat. Debat terbuka memberi ruang lebih luas bagi para pemilih untuk berpikir dan mendukung kandidat tertentu yang dianggap lebih menguasai isu yang diperdebatkan, lebih rasional-argumentatif, dan lebih banyak memberi masukan (data) yang menopang argumen sang kandidat. Selain itu, media massa cetak juga memiliki andil dalam memberitakan keunggulan dan kelemahan para kandidat dalam tiga kali acara debat publik yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi swasta. Usai acara debat pertama, misalnya, *Koran Tempo* menilai pasangan Anies-Sandi unggul dengan nilai 82,75, sedangkan Ahok-Djarot dan Agus-Sylvi hanya mendapat nilai 76,25 dan 72,5.¹⁷

Pemirsa yang menonton acara debat pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menilai positif argumen dan elaborasi program kerja pasangan Anies-Sandi. Sejak November 2016 hingga 15 Februari 2017, suara (calon) pemilih pasangan itu terus menanjak (lihat, Gambar 1). Pada Oktober 2016, berada di peringkat ketiga dengan angka 23,3 persen, lebih rendah dari pasangan Ahok-Djarot yang mendapat dukungan suara 43,4 persen dan Agus-Sylvi yang 23,5

persen. Namun, sejak November 2016, pasangan Anies-Sandi mendapat 23,9 persen, naik menjadi 24,4 persen pada Desember 2016, naik dua poin menjadi 26,4 persen pada Januari 2017, dan menjelang serta saat pencoblosan 15 Februari 2017 bertengger pada angka 33,5 persen dan 40,05 persen (lihat, Gambar 1, bandingkan dengan Gambar 2). Sebaliknya, tampilan Agus-Sylvi yang tidak prima dalam debat publik tersebut membuat daya magnet pasangan ini merosot. Padahal, sejak Oktober hingga Desember 2016, perolehan suara pasangan mantan tentara dan birokrat itu naik cukup signifikan dari 23,5 persen pada Oktober menjadi 30,3 persen pada November dan agak stagnan pada angka 30,8 persen di bulan Desember 2016 (lihat, Gambar 1). Pasangan Agus-Sylvi kehilangan banyak (suara) pendukung bertepatan dengan hari pencoblosan 15 Februari 2015. Dengan kata lain, debat publik turut mendorong atau mengalihkan suara (calon) pemilih terhadap kandidat tertentu.

Faktor lain yang juga bisa memengaruhi pilihan para pemilih adalah karakter pribadi para kandidat yang berkorelasi dengan kinerja mereka masing-masing. Dalam konteks Pilkada Jakarta, karakter personal para kandidat memiliki banyak dimensi mulai dari kemampuan dalam memimpin, ketegasan, kejujuran, integritas, dan empati pada rakyat. Agregat dari aspek personal itu akan sangat memengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. Sebagai contoh, sebagian besar pemilih yang tercerabut atau merasa tergusur dari lingkungan tempat tinggalnya cenderung tidak akan memilih pasangan Ahok-Djarot yang dianggap tidak berempati pada penderitaan rakyat. Artinya, para (calon) pemilih condong tidak memberikan suara kepada kandidat yang mereka nilai "berkarakter negatif." Sebaliknya, suara para (calon) pemilih bergerak ke arah kandidat yang mereka nilai memiliki "karakter positif", sebagaimana diperlihatkan pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi.

Pemilihan langsung kepala daerah DKI Jakarta akhirnya diselenggarakan pada 15

¹⁷ *Koran Tempo*, 14-15 Januari 2017, hal 1.

Februari 2017. Namun, pilkada tersebut tidak menghasilkan pemenang mutlak (50% lebih). Dari 5.525.860 pemilih yang menggunakan hak pilih, 2.364.377 (setara dengan 42,91% suara) di antaranya memilih pasangan Ahok-Djarot diikuti Anies-Sandi yang mendapat 2.197.333 (40,05%) suara dan pasangan Agus-Sylvi yang memperoleh 937.955 (17,05%) suara.¹⁸ Karena tidak ada pemenang mutlak, maka pilkada harus diulang dan diselenggarakan dua bulan berikutnya pada 19 April 2017.

Pilkada DKI Jakarta: Putaran Kedua

Hasil Pilkada DKI Jakarta putaran pertama memperlihatkan bahwa pasangan Agus-Sylvi harus keluar dari kontestasi pemilihan calon gubernur-wakil gubernur. Ada dua hal yang menarik dan perlu dicermati selepas pilkada putaran pertama, yaitu ke mana 17,05 persen suara yang diperoleh pasangan Agus-Sylvi akan berlabuh dan ke mana koalisi partai politik pendukung pasangan itu akan bersandar dalam pilkada putaran kedua.

Pada pilkada putaran kedua, partai-partai pendukung Agus-Sylvi terbelah menjadi tiga kubu: (i) PAN memilih Anies-Sandi, (ii) PPP dan PKB mendukung Ahok-Djarot, dan (iii) Partai Demokrat memilih untuk netral (baca: memberi kebebasan kepada anggota partai untuk memilih pasangan tertentu). Dengan demikian, konfigurasi partai politik pendukung kedua pasangan itu terbelah menjadi enam partai (PDI-P, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB) untuk pasangan Ahok-Djarot serta tiga partai (Gerindara, PKS, dan PAN) untuk pasangan Anies-Sandi.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa dukungan partai politik terhadap pasangan

tertentu tidak serta-merta “mewakili” dukungan para (calon) pemilih. Pada pilkada putaran pertama, pasangan Anies-Sandi yang didukung Gerindra dan PKS mendapat suara melebihi 25 persen suara yang berhasil diperoleh kedua partai ini pada Pemilu 2014. Sementara itu, dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, pasangan Anies-Sandi yang didukung Gerindra dan PKS memperoleh 40 persen suara. Hal serupa juga berlaku bagi partai-partai pendukung pasangan Ahok-Djarot dan Agus-Sylvi. Secara matematis, pasangan Ahok-Djarot didukung oleh koalisi partai politik yang memiliki 48 persen suara di parlemen, namun pada pilkada putaran pertama pasangan itu memperoleh 42,91 persen suara—penurunan suara lebih dari 5 persen. Demikian pula dengan pasangan Agus-Sylvi yang turun 10 persen dari 27 persen menjadi 17,05 persen. Dengan kata lain, suara yang diperoleh partai pada ajang pemilu tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan pemilih saat pilkada berlangsung.

Ada tiga faktor—isu agama, hasil debat publik, dan karakter kandidat—yang sangat menentukan naik-turunnya perolehan suara para kandidat pada pilkada putaran pertama. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menentukan naik-turunnya dukungan pemilih terhadap pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi pada pilkada putaran kedua? Mengapa petahana yang sejak awal tampil cukup kuat akhirnya kalah dengan selisih persentase sangat lebar? Lantas strategi apa saja yang digunakan pasangan Anies-Sandi untuk meluluhlantakkan kedigdayaan pasangan Ahok-Djarot?

Menurut penulis, setidaknya ada tiga faktor yang membuat pasangan Anies-Sandi mengguguli pasangan Ahok-Djarot pada pilkada putaran kedua. *Pertama*, isu penistaan agama. Lembaga PolMark—konsultan politik yang merancang strategi dan kampanye pasangan Anies-Sandi—berhasil membingkai isu “sensitif” itu pada putaran pertama dan terus digunakan pada putaran kedua. Sulit disangkal, gelombang sentimen negatif terhadap pasangan Ahok-Djarot atas tuduhan penistaan agama digunakan

¹⁸ Keputusan KPU Nomor: 40/Kpts/KPU-Prov-10/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017.

secara cerdas oleh pasangan Anies-Sandi. Dalam berbagai kesempatan, pasangan Anies-Sandi kerap kali mengasosiasikan diri sebagai bagian dari komunitas pemilih Muslim yang melakukan sejumlah demo masif. Misalnya, di tengah-tengah percakapan dalam debat publik yang diselenggarakan *Kompas TV*, Anies memperkenalkan diri seraya menunjuk ke arah istrinya dan istri Sandi yang berhijab.

Bahkan, belum lepas dari ingatan ketika Anies berkunjung ke markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat. Realita itu menunjukkan posisi Anies yang kian memudahkan sosoknya sebagai pendukung “Islam moderat.” Tidak hanya itu. Secara terang-terangan Anies “memanfaatkan” jaringan masjid untuk merengkuh suara pemilih Muslim, yang pada putaran pertama tidak dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pasangan Agus-Sylvi, apalagi Ahok-Djarot. Upaya dan strategi yang dijalankan Anies seolah mempertegas pandangan bahwa gubernur Jakarta harus seorang Muslim. Hal demikian tidak hanya membuat basis dukungan yang telah diperoleh pada putaran pertama semakin kuat dan stabil, melainkan juga berhasil mengambil hati para pemilih Agus-Sylvi yang pada akhirnya melejitkan perolehan suara pasangan Anies-Sandi dari 40,05 persen menjadi 57,95 persen.¹⁹

Kedua, karakter atau personalitas kandidat. Dalam hal itu, citra Ahok tampak kurang mendukung untuk menjadi pemimpin yang mudah diterima rakyat banyak. Dia dikenal sebagai individu yang temperamental (tidak ramah) dan kurang dapat “menjaga mulut.” Contoh paling gamblang adalah ketika dia berbincang dengan masyarakat di Kepulauan Seribu, yang kemudian “digoreng” oleh lawan-lawan politiknya untuk memperburuk citra Ahok di mata pemilih, terutama sebagian para pemilih pemula yang cenderung memilih pasangan Anies-Sandi. Di samping itu, Ahok kerap berang terhadap pelbagai pihak, termasuk

jurnalis yang tengah meliputnya. Padahal, seorang pemimpin seperti Ahok seharusnya *legawa* menerima pelbagai kritik dan masukan. Hal tersebut bertolak belakang dengan citra atau karakter yang dibangun Anies-Sandi yang relatif santun dan senantiasa menjaga budi bahasa.

Merujuk survei Indikator Politik Indonesia Mei-Juni 2016, 76 persen warga Jakarta puas dengan kinerja Ahok. Namun, yang agak membingungkan, dari 76 persen warga tersebut hanya 53 persen saja yang sudi memilihnya jika pilkada diselenggarakan pada saat survei itu dilakukan.²⁰ Artinya, ada semacam kesenjangan antara kepuasan atas kinerja kepala daerah dengan keterpilihannya dalam ajang pilkada. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Menurut penulis, sekali lagi, salah satu penyebabnya adalah karakter atau personalitas Ahok. Karakter yang temperamental dan kurang pandai “menjaga mulut” membuat kinerja Ahok yang dinilai bagus sebagai pemimpin dan “pelayan rakyat” otomatis memudar.

Selain itu, Ahok berada dalam “dua lapis minoritas” yang membuatnya selalu mendapat kendala dalam berpolitik, yaitu minoritas secara keagamaan (Kristen Katolik) dan minoritas secara etnis (Tionghoa). Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, naik dan berkuasanya tokoh seperti Ahok—atau mereka yang “menyandang” dua lapis minoritas seperti Ahok—menimbulkan kekhawatiran atas bangkitnya dominasi Kristen-Tionghoa yang sebelumnya dianggap selalu mendominasi perekonomian Indonesia. Meminjam cara berpikir Orde Baru, bagi masyarakat “pribumi”, masuk dan berkuasanya Kristen-China dalam kancah politik merupakan ancaman serius bagi penguasaan “pribumi” dalam dunia politik.

Ketiga, gagalnya mesin koalisi partai-partai pengusung untuk bekerja sama memenangkan

¹⁹ *Kompas*, 21 April 2017, hal. 1.

²⁰ Burhanuddin Muhtadi, “Mitos Pemilih Jakarta Rasional?”, dalam *Tempo*, 27 Februari-5 Maret 2017, hal. 44.

KECAMATAN	KELURAHAN	Abok Putaran 1		Abok Putaran 2		delta suara (%)	Analis-Angg Putaran 1		Analis-Angg Putaran 2	
		Suara	(%)	Suara	(%)		Suara	(%)	Suara	(%)
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	6.389	49.13	6.490	49.40	1.58	6.614	50.87	6.646	50.6
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	2.217	41.19	2.190	40.50		3.165	58.81	3.271	59.5
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	5.655	49.31	5.522	47.80		5.813	50.69	6.079	52.2
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	6.610	45.33	6.190	43.70		7.971	54.67	7.962	56.3
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	7.411	46.84	7.820	45.50	5.52	8.412	53.16	9.352	54.5
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	8.644	50.52	8.532	49.10	-1.06	8.465	49.48	8.848	50.9
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	5.866	46.04	5.846	45.00	-0.34	6.874	53.96	7.156	55.0
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	5.549	49.82	5.597	49.90	0.87	5.588	50.18	5.627	50.1
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	3.450	47.83	3.541	47.50	2.64	3.763	52.17	3.911	52.5
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	20.720	47.16	20.642	45.20	-0.38	23.215	52.84	25.076	54.8
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	12.493	42.92	12.409	41.60	-0.67	16.615	57.08	17.441	58.4
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	7.855	44.61	7.662	42.60	-2.46	9.753	55.39	10.311	57.4
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	10.917	48.14	10.793	46.30	-1.14	11.761	51.86	12.540	53.7
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	8.867	42.16	8.821	40.60	-0.52	12.163	57.84	12.884	59.4
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	17.865	44.00	17.567	42.50	-1.67	22.736	56.00	23.813	57.5
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	10.527	42.77	10.424	41.70	-0.98	14.088	57.23	14.603	58.3
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	10.317	41.81	10.454	40.70	1.33	14.358	58.19	15.210	59.3
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	14.706	45.63	14.636	44.40	-0.48	17.524	54.37	18.323	55.6
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	12.622	49.27	12.981	48.30	2.84	12.998	50.73	13.918	51.7
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	10.403	50.49	10.499	49.60	0.92	10.203	49.51	10.678	50.4
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	6.905	40.15	7.121	38.60	3.13	10.291	59.85	11.307	61.4
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	5.204	41.88	5.155	40.50	-0.94	7.222	58.12	7.575	59.5
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	4.958	45.30	4.938	43.60	-0.40	5.988	54.70	6.390	56.4
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	20.324	43.81	20.313	41.50	-0.05	26.072	56.19	28.601	58.5
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	18.268	48.51	18.063	46.20	-1.12	19.392	51.49	21.018	53.8
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	9.730	48.71	9.733	47.30	0.03	10.246	51.29	10.840	52.7
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	22.097	49.39	22.480	47.70	1.73	22.646	50.61	24.650	52.3
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	38.958	49.81	38.705	47.80	-0.65	39.254	50.19	42.283	52.1
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	12.649	42.02	12.472	39.00	-1.40	17.451	57.98	19.251	60.7
KECAMATAN BANGKALAN	KECAMATAN BANGKALAN	21.413	50.48	20.949	47.70	-2.17	21.002	49.52	22.967	52.1
						-0.19				

Sumber: @BurhanMuhtadi (diunduh 21 April 2017).

pasangan Ahok-Djarot (Bandingkan dengan Gambar 3). Sebaliknya, Tim sukses pasangan Anies-Sandi berhasil menjalin kerja sama mendulang dukungan dari pemilih Muslim dan pemilih pemula di banyak kelurahan dan kecamatan. Sebagai contoh, Gambar 3 yang digunakan Indikator Politik Indonesia untuk menganalisis hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua menunjukkan bahwa pasangan Ahok-Djarot mengalami “kekalahan” di 20 dari 30 kelurahan yang dijadikan sampel oleh lembaga survei ini.

Upaya yang dilakukan tim relawan Anies-Sandi adalah dengan membentuk enam simpul relawan yang tersebar di seluruh Provinsi Jakarta: Simpul Relawan Boy Sadikin, Simpul Pendopo, Simpul Melawai, Simpul Cicurug, Simpul Keutamanaan, dan Simpul Kelompok Majelis Taklim. Masing-masing simpul membawahi kelompok relawan dengan jumlah sangat bervariasi. Simpul Cicurug, misalnya, membawahi 120 kelompok relawan, Simpul Pendopo membawahi 35 kelompok, dan lain-lain. Di luar simpul utama tersebut ada sekitar 123 ribu relawan yang mendaftar secara daring.²¹ Simpul serta kelompok itu terus diberdayakan pada pilkada putaran kedua. Tidak heran bila beberapa media massa cetak dan elektronik yang melaksanakan survei jelang 19 April 2017 mendapati kemenangan yang signifikan bagi pasangan Anies-Sandi.²² Jauh sebelum putaran kedua, ketika Indikator Politik Indonesia melakukan survei *exit-poll* pada 15 Februari 2017, Anies-Sandi diprediksi akan mendapat 52,4 persen suara berbanding Ahok-Djarot yang

43,3 persen²³—tidak terpaud jauh dengan *real count* Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 57,95:42,05 persen.²⁴

Apa arti faktor tersebut bagi Ahok dan Anies? Bagi Ahok, mesin partai tidak bisa diandalkan dalam mendulang suara. Yang lebih berperan saat ini—atau beberapa tahun terakhir—dalam mengumpulkan suara para pemilih justru tim relawan yang notabene non-partai. Sementara itu, bagi Anies, pendayagunaan tim relawan dalam mengumpulkan suara dengan “mengemas” isu agama mencapai puncaknya pada 19 April 2017. Hal itu juga tampak dalam Pemilu Presiden 2014; tim relawan pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil mengumpulkan suara dari pelbagai kohor, tingkat pendidikan, wilayah, dan lain-lain. Selain itu, tim relawan Jokowi-JK dianggap lebih militan dibanding tim relawan Ahok-Djarot. Hal lain yang tidak dapat dimungkiri adalah kentalnya sentimen keagamaan yang “diangkat” oleh Tim Relawan, Tim Sukses, dan kelompok-kelompok pendukung pasangan Anies-Sandi.

Merujuk dinamika politik pilkada putaran kedua, sulit mengatakan bahwa pemilih Jakarta lebih rasional jika dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya di Indonesia.²⁵ Hal itu dikarenakan perilaku pemilih di Jakarta belum didasarkan visi, misi, program, atau kinerja yang ditawarkan maupun yang telah dilaksanakan oleh kandidat tertentu. Dalam konteks Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017, (suara) pemilih bergerak ke arah sosiologis dengan kesamaan agama yang dianut pemilih dan kandidat menjelaskan dukungan politik para pemilih. Dengan kata lain, kesamaan agama melandasi motif pemberian suara. Namun, berbeda dengan kajian teoretis sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, kesamaan agama

²¹ *Tempo* 13-19 Februari 2017, hal. 45.

²² Beberapa media massa cetak dan elektronik yang melakukan *polling* atau survei menempatkan perolehan suara pasangan Anies-Sandi lebih tinggi dibanding pasangan Ahok-Djarot. *Media Indonesia*, misalnya, menyebut 60 berbanding 37 persen untuk Anies-Sandi; *Harian Bernas* 91:9; *Tempo.co* 43:41; *Republika.co.id* 77:21; *KompasTV* 55:41; *CNN Indonesia* 57:43; *Radio Elshinta* 74:26; dan *VIVAcoi*d 64:36i. Penulis memperoleh data *polling* dan survei itu dari cuitan Twitter Official masing-masing media.

²³ *Tempo*, 20-26 Februari 2017, hal. 35.

²⁴ *Kompas*, 21 April 2017, hal 1.

²⁵ Bandingkan dengan Leo Agustino, “Petahana Tidak Selalu Menang!”, dalam Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 192-208.

antara pemilih dan kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta merupakan *political construct* atau pembingkai atas isu keagamaan dan bukan kesadaran yang sejati.

Penutup

Artikel ini menganalisis Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Di sana ada beberapa faktor yang menentukan dan memengaruhi perilaku pemilih dalam memilih kepala daerah. Pilkada tersebut berlangsung dalam dua putaran, karena tidak ada satu pun pasangan calon memperoleh 50 persen lebih dukungan publik. Pada putaran kedua, sebagian besar pemilih memilih pasangan Anies-Sandi dan menolak pasangan Ahok-Djarot. Beberapa faktor yang membuat pemilih cenderung lebih memilih pasangan

nomor urut tiga adalah: pemanfaatan isu agama, hasil debat publik, dan karakter kandidat (pada putaran pertama), serta isu agama, karakter kandidat, dan kerja sama yang *solid* dari tim relawan masing-masing pasangan kandidat menjelang pemilihan putaran kedua. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa “pemanfaatan” isu (penistaan) agama dan “masalah karakter” merupakan penyebab utama kekalahan petahana dalam Pilkada DKI Jakarta periode 2017-2022. Karena itu, para pemilih di Jakarta sulit untuk dikatakan sebagai pemilih rasional karena—dengan memakai kacamata pendekatan *rational choice theory*—dasar pilihan mereka bukan berlandaskan visi, misi, program, ataupun kinerja kandidat yang tengah bersaing •

Leo Agustino

